

HAKIKAT HUKUM DAN PEMBIDANGANNYA; SUATU PERBANDINGAN ANTARA PAHAM BARAT DAN ISLAM

Faisal Zulfikar

Dosen Fak. Syariah UIN Banten

Abstrak

Hukum adalah sebuah cabang ilmu yang mengkaji objek yang luas, ia sulit didefinisikan karena sifat dan karakteristiknya yang luas. Namun dalam perkembangannya ilmu hukum masuk dalam setiap cabang ilmu karena kehidupan manusia tidak terlepas dari ketentuan dan aturan hukum. Berkaitan dengan itu muncul kemudian pembidangan hukum, dan dalam konteks ini adalah lahir dari filsafat hukum. Namun demikian konsep si pemikiran yang luas seperti dalam paham barat dan Islam tidak memiliki keseragaman, mereka berangkat dari postulat yang berbeda, oleh karena itu makalah ini mencoba sedikit untuk menjelaskannya.

Kata Kunci: Filsafat, Hukum, Barat, Islam

A. Pendahuluan

Islam sangat diyakini sebagai sebuah Ajaran yang berasal dari Tuhan dan disampaikan melalui Rasulnya. Hukum Islam pula diyakini mencakup seluruh aspek kehidupan Manusia dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan. Selain itu ia pun mampu mengikuti perkembangan keadaan zaman yang terus berubah, namun tetap bersandar kepada sumber awal yaitu Al-qur'an, dan Hadits.

Tentunya dari sini Hukum tersebut pun memiliki sebuah makna khusus atau hakikat, yaitu sesuatu yang melatarbelakangi timbulnya hukum bagi kemaslahatan umat. Hakikat hukum dalam Islam tentunya adalah berkaitan dengan beberapa prinsip yang

banyak dikemukakan di dalam Ushul Fiqh sebagai (*Legal Theory*) dan diyakini juga sebagai ilmu filsafat Islam.

Dengan begitu maka mulai muncul pembidangan yang berkaitan dengan berbagai ranah dalam setiap kehidupan manusia, bidang-bidang tersebut adalah yang menyangkut dua hal besar yaitu Ibadah dan Muamalah. Dan dari dua hal besar tersebut akan mengakar cabang-cabang hukum spesifik dalam setiap permasalahan. Hal ini adalah sebuah indikasi bahwa hukum Islam mampu menjangkau setiap ranah dalam kehidupan manusia. Seperti kita ketahui juga bahwa hukum adalah sesuatu yang masih bersifat Abstrak dan mampu menjangkau berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Seperti juga halnya pemahaman di Islam, di Barat pun makna hakikat hukum tidaklah jauh berbeda, namun dalam pijakan dan pedomannya saja berbeda. Dalam Islam Al-qur'an adalah sumber utama pedoman hukum, sedangkan doktrin Barat mengacu kepada yuridiksi dan Legal Theory yang bersumber dari manusia itu sendiri. Tidak jauh berbeda pula bahwa hakikat hukum adalah berusaha untuk menjadi penata kehidupan sosial agar lebih teratur. Walaupun nantinya akan berbeda dalam kurun waktu yang berbeda, yaitu dapat dibedakan antara zaman klasik dan modern. Pada zaman permulaan hukum masih disebut sebagai kejadian alami yang bersifat etika. Sedangkan masa modern hukum cenderung disamakan dengan Undang-undang Negara, dan dari masa ini juga mulai timbul adanya pembidangan Hukum¹.

B. Hakikat Hukum

Telah disinggung sebelumnya bahwa hukum Islam adalah hukum yang diyakini mampu menerawangi kehidupan manusia sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam hakikat hukum tersebut akan dibahas beberapa dasar dan alasan hukum tersebut dibuat dan dilaksanakan. Kemudian berkenaan dengan hakikat tersebut muncul kemudian filsafat hukum Islam sebagai

¹ DR. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, 1995 hlm 21

sebuah kajian yang membahas secara khusus mengenai hukum Islam sebagai obyek pembahasan. Sehingga dari hal tersebut akan didapat sebuah alasan yang logis dan sistematis dan keterangan yang mendasar mengenai hukum Islam dengan Filsafat sebagai alatnya.

Filsafat seperti yang sudah banyak kita ketahui merupakan pemikiran yang mendalam dan pemikiran bijak terhadap sesuatu. Walaupun tidak dibahas secara mendetail disini tentang makna filsafat, tetapi setidaknya kita mengetahui bahwa filsafat secara garis besar.

Dalam hakikat tersebut tentulah memiliki makna dan tujuan hukum Islam dibentuk. Tujuan tersebut adalah menciptakan kedamaian umat manusia seluruhnya, tidak hanya kebahagiaan di dunia saja melainkan kebahagiaan yang bersifat ukhrowi. Dan tentunya berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia, karena hukum tersebut hanya berorientasi kepada masalah keduniaan saja. Oleh karena itu hukum Islam memiliki beberapa prinsip dalam setiap penerapan hukum yang juga merupakan hakikat penerapannya:

1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan
2. Menyedikitkan beban
3. Ditetapkan secara bertahap
4. Memperhatikan kemaslahatan manusia
5. Mewujudkan keadilan yang merata.

Membicarakan masalah hakikat hukum dalam konsepsi barat tidak akan terlepas dari periodisasi zaman klasik dan modern. Zaman klasik ditandai dengan adanya hukum sebagai salah satu gejala alam yang berasal dari Tuhan, sehingga manusia hanya mampu mengikutinya dan mentaati aturan tersebut. Makna hukum saat itu adalah *Natural* dan berasal dari Tuhan. Sedangkan masa berikutnya yaitu masa modern, hukum mulai berubah maknanya. Hal ini ditandai dengan banyak lahirnya aliran-aliran dalam bidang etika dan hukum. Yang termashur antara lain adalah Positivisme, aliran ini meyakini bahwa hukum adalah berasal dari sesuatu yang bersifat empiris dan fakta-fakta

yang nyata. Namun pada kenyataannya tetap saja keadilan adalah tujuan utama dalam pembentukan hukum. Yaitu keadilan yang menyeluruh bagi perdamaian manusia². Tidak sampai disitu pembahasan berakhir, ada beberapa dikotomi makna hukum yang membedakan hakikat hukum dan orientasinya dalam realitas sehari-hari.

Yang pertama adalah hukum dalam arti keadilan, yaitu keadilan = *Iustitia*. Hukum disini menandakan sebuah peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Sedangkan yang kedua adalah hukum dalam arti undang-undang atau *Lex/wet* yaitu kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Yang pertama dalam kacamata analisa merupakan suatu hukum yang masih menyangkut tujuan utama arti hukum itu sendiri, karena ia tetap berorientasi kepada norma-norma masyarakat dan mengerti tujuan masyarakat tersebut. Sedangkan yang kedua adalah undang-undang yang merupakan produk politik yang memiliki term keadilan sebagai dari kebijakan pemerintah yang berkuasa. Namun apapun itu pada dasarnya hukum adalah sarana untuk menata kehidupan manusia seutuhnya.

C. PEMBEDANGAN HUKUM

Para ahli ushul fiqh, sebagaimana ahli filsafat hukum islam membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu *falsafat tasyri'* dan *falsafat syari'ah*.

1. Falsafat tasyri': Filsafat yang memancarkan hukum islam atau yang menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam.

Filsafat tasyri' terbagi kepada :

- a. Da'aim al-ahkam (dasar-dasar hukum Islam)
- b. Mabadi' al-ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam)

² DR Theo Huijbers, op.,cit. hlm 49

- c. Ushul al-ahkam (sumber-sumber hukum Islam)
 - d. Maqhasid al-ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam)
 - e. Qawa'id al-ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam)
2. Falsafah syari'ah : Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, 'ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pembagian falsafat syari'ah adalah :
- 1. Asrar ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam)
 - 2. Khasha'is al-ahkam (ciri-ciri khas hukum Islam)
 - 3. Mahasin al-ahkam atau Mazaya al-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam)
 - 4. Thawabi' al-ahkam (karakteristik hukum Islam)³

Pembidangan juga terjadi dalam sistem hukum barat dengan mengacu kepada beberapa hal. Tentu saja pembidangan ini berjalan seiring dengan berkembangnya dinamika hukum di masyarakat.

1. Hukum tertulis dan tidak tertulis

dalam hal ini kita akan menemukan penggolongan yang besar antara suatu hukum tertulis dan tidak tertulis. Pada masa modern saat ini, hukum adalah suatu Undang-undang yang tertulis atau terkodifikasi. Karena banyak aliran juga menyatakan bahwa hukum adalah Undang-undang, sesuai dengan perkembangan zaman tadi bahwa hukum mulai berkembang dan sudah tidak bisa lagi mengacu kepada tradisi dan kebiasaan yang tidak tertulis. Hukum harus bersifat kompleks dan menyekuruh sehingga muncul berbagai bidang hukum yang tertulis untuk menunjang itu semua.

Kelebihan hukum tertulis dibanding hukum tidak tertulis dalam melayani kehidupan modern sebagaimana disebutkan diatas adalah antara lain:

- 1. Apa yang diatur dengan mudah dapat diketahui orang.⁴

³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, logos 1999, hlm 16

2. Setiap orang, kedualii yang tidak bisa membaca, mendapatkan jalan masuk yang sama kedalam hukum.
3. Pengetahuan orang tentang hukum senantiasa bisa dicocokkan kembali dengan yangtelah dituliskan, sehingga mengurangi ketidak pastian.
4. Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukumtertulisi juga menyediakan banyak kemudahan⁵.

2. Hukum Perdata dan Hukum Publik

Ada dua perbedaan yang mencolok antara sistem hukum Anglo saxon dan Continental. Pada sistem anglo saxon, penggolongan perdata dan public tidaklah setajam yang ada di sistem hukum continental. Biasanya di banyak Negara-negara bersistem anglo saxon hukum perdata dan public disatukan menjadi kaidah yang sama. Sedangkan dalam continental hal itu dibedakan, dalam hukum perdata lebih mengetengahkan hukum yang bersifat privat, yaitu mengurus antara perorangan, sedangkan hukum public menangani maslah sengketa pemerintah dan perorangan.

Pembedangan dalam kedua hukum tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Hukum Perdata : hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang, hukum internasional perdata

Hukum public : hukum pidana, hukum tata Negara, hukum administrasi, hukum internasional public, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi.

3. Hukum Domestik dan Internasional

suatu penggolongan lain yang penting adalah kedalam hukum domestic dan internasional. Orang saja bisa menggunakan pembedaan kedalam nasional dan internasional, tetapi disini

⁵ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung 2000, hlm 72

dipilih kat domestik terutama untuk menekankan pada aspek beografisnya. Hukum domestic itu berbeda dan berlaku didalam wilayah suatu Negara dan dengan demikian mengatur hubungan dan kejadian di dalam wilayah Negara tersebut.

Dalam pada itu hukum internasional mengatur hubungan antar Negara. Kita bisa melihat, bahwa dalam penggolongan tersebut terlibat masalah *kedaulatan Negara*, sehingga bisa juga di katakan, bahwa kedaulatan itulah yang akan menjadi masalah yang penting baik dalam kaitannya dengan hukum domestik maupun internasional.

4. Hukum Substantif Dan Prosedural

Peraturan hukum yang dikeluarkan dengan mekanisme oleh pembuat hukum, yang kemudian mengatur suatu perbuatan itu boleh atau tidak dengan sangsi-sangsi yang akan diterima oleh anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat, lebih lanjut peraturan tersebut disebut hukum substantif. Dapat dicontohkan seperti hukum pidana, hukum perdata dll.

Kemudian setelah peraturan tersebut dibuat oleh pembuat hukum, haruslah ada hukum yang mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut, yaitu yang bersifat prosedural. Seperti akan kita jumpai hukum pidana (Substantif) berpasangan dengan hukum acara pidana (prosedural), dan hukum perdata berpasangan dengan hukum acara perdata⁶.

D. Penutup

Demikianlah sekiranya hakikat hukum pada dasarnya merupakan wadah dan sarana bagi penataan masyarakat kearah yang lebih baik. Seperti diuraikan bahwa baik Islam maupun barat memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda mengenai hakikat sebuah hukum, meskipun pada kelanjutannya memiliki pijakan yang berbeda dan hasil yang berbeda pula. Tetapi dapat disimpulkan memiliki tujuan yang sama.

⁶ Satjipto Raharjo, *op.cit.* hlm 78

Adapun mengenai pembedan hukum, hal tersebut terjadi disebabkan makin berkembangnya pengetahuan manusia terhadap hukum, maka dituntut adanya case-case tersendiri yang menangani masalah khusus tersebut. Baik Islam maupun barat mengerti akan kehidupan manusia yang semakin kompleks, oleh karenanya pembedan dalam bidang hukum merupakan manifestasi dari hakikat hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathurrahman Djamil, M.A , *Filsafat Hukum Islam*, Logos 1999
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara 1999
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung 2000
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius Yogyakarta 1995